

# AKUNTABILITAS PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

Siti Khadijah<sup>(1)</sup> M Sayuti Enggok<sup>(2)</sup>, A.Nikhrawi Hamdie<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup>Administrasi Publik, 63101, FISIP, UNISKA, NPM18120058

<sup>(2)</sup>Administrasi Publik, 63101, FISIP, UNISKA, NIDN1122035801

<sup>(3)</sup>Administrasi Publik, 63101, FISIP, UNISKA, NIDN1105026402

Email: [sitikhadijah4947@gmail.com](mailto:sitikhadijah4947@gmail.com)

## Abstrak

*“Pengaruh Pemahaman Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”. Essay. Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs, Subowo, M. Si Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) adalah ukuran keuntungan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik guna menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, dan menjalankan tujuan, visi dan misi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dapat dilihat dari lima aspek yaitu kualitas kerja, produktivitas, pengetahuan, disiplin serta kepuasan pengguna dalam menggunakan jasa pemerintah. akuntabilitas sebagian instansi pemerintah Populasi dalam penelitian ini adalah 16 SKPD yang terdapat di Kabupaten Kendal Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini pelelangan 6 SKPD. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, dan diukur dengan menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linier berganda. Hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemahaman prinsip tata kelola yang baik, pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Dari hasil penelitian disarankan: pengembangan dan peningkatan kinerja sistem bersifat lifecycle, agar kinerja pemerintahan lebih optimal dan lebih baik, dan penelitian selanjutnya dapat menambah tempat tidak hanya pada penelitian di Kendal saja.*

**Kata Kunci :** *Good Governance, Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan, Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.*

## REFERENSI

Buku: Edvardsson et al (2011) jasa atau pelayanan publik juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.

Fandy Tjiptono (2013:11) Dengan semakin tingginya kualitas pelayanan publik maka kepuasan masyarakat terhadap instansi pemerintah terpenuhi.

Haris (2011:349), Akuntabilitas kewajiban dari individu – individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik.

Haksever et al (2012) menyatakan bahwa jasa atau pelayanan publik (services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan

waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis.

Puspitosari (2016) Akuntabilitas pegawai dan pelayanan publik pada kantor kecamatan juai kabupaten balangan.

Dwiyanto, Agus. (2015) Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik.

Jurnal: Harry Murty, Veronika Agustini Srimulyani, (10-17, 2013). Jurnal Riset Manajemen dan akuntansi. <https://ejournal scholar.google.co.id/citations?user=HVHA0OAAAAAJ&hl=id>. Diakses 25 April 2022

Hopwood dan Tomkins, (1984); Elwood, (1993) dalam Mahmudi (2013:9), Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sector publik. <http://ejournalrepository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22471/naskah%20publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=v>. Diakses

